

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **3.1 Tinjauan Teori**

##### **3.1.1 Kinerja Keuangan**

Kinerja (*performance*) menurut Amin widjaja Tunggal (2010:521) diartikan sebagai dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan. Pengukuran kinerja diartikan sebagai suatu sistem keuangan atau non keuangan dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai dari suatu aktivitas, suatu proses atau suatu unit organisasi. Kinerja keuangan adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui sesuatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk dari pengukuran kinerja keuangan tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari sistem laporan pertanggungjawaban kepala daerah berupa perhitungan APBD.

Menurut Indra Bastian (2006: 276-277) aspek-aspek Kinerja keuangan diukur, yaitu sebagai berikut:

- a. Aspek finansial
- b. Kepuasan pelanggan
- c. Operasi dan bisnis internal
- d. Kepuasan pegawai
- e. Kepuasan komunitas
- f. Waktu

Menurut Mardiasmo (2004: 121) Pengukuran Kinerja keuangan dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan:

- a. Untuk membantu memperbaiki Kinerja Keuangan pemerintah.

- b. Untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.
- c. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban public dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Penilaian kinerja adalah melakukan pengukuran hasil berikutnya dalam bagian atau aktivitas yang menjadi daerah wewenang manajer tersebut.

Sehingga menurut saya Kinerja adalah pengukuran keberhasilan suatu aktivitas yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan kinerja keuangan adalah tingkat hasil pencapaian dari suatu aktivitas untuk menghasilkan barang ataupun jasa, sehingga tercipta kepuasan atas aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah.

### **3.1.2 Anggaran Pemerintah**

Anggaran pemerintah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk dapat menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan menjadi defisit atau surplus. Yang dimaksud dengan anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi kegiatan perusahaan atau instansi pemerintah, yang dinyatakan dalam satuan keuangan (unit moneter), dan berlaku untuk jangka waktu tertentu yang akan datang.

Anggaran pemerintah merupakan pedoman bagi segala tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah secara terpadu. Dalam penyusunan anggaran tersebut pemerintah menggunakan sistem anggaran berimbang. Anggaran akan mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah dan memberi landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan oleh pemerintah untuk suatu periode tertentu yang biasanya mencakup periode tahunan. Dalam proses penganggaran dalam pemerintah akan terkait dengan penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam

satuan moneter. Tahap penganggaran ini menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang sudah disusun dengan demikian fungsi anggaran di lingkungan pemerintah mempunyai pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan keuangan antara lain karena:

- a. Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik
- b. Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan dan pembiayaan yang diinginkan
- c. Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum
- d. Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah kepada publik

### **3.1.3 Anggaran Kinerja**

Anggaran dengan pendekatan kinerja merupakan suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja/output dari perencanaan alokasi biaya/output yang ditetapkan (Mardiasmo, 2002:61). Untuk mengukurnya perlu dikembangkan hal-hal berikut:

- a. Standar Analisis Belanja (SAB)

Standar analisis belanja adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan. Tujuan penyusunan:

1. Meningkatkan unit kerja dalam penyusunan anggaran berdasarkan skala prioritas anggaran daerah, tugas pokok dan fungsi, tujuan sasaran, serta indikator kinerja pada setiap program dan kegiatan yang direncanakan;
2. Mencegah terjadinya duplikasi dan tumpang tindih kegiatan dan anggaran belanjanya pada masing-masing unit kerja;
3. Menjamin kesesuaian antara kegiatan dan anggaran dengan arah, kebijakan, strategi dan prioritas penyelenggaraan pemerintahan dan

pelayanan publik, mengurangi tumpang tindih belanja dalam kegiatan investasi dan non investasi;

4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

b. Tolak Ukur Kinerja

Tolak ukur kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja perangkat daerah. Satuan ukur unit kerja harus berupa angka numerik, dapat diperbandingkan dan cukup spesifik. Satuan ukur harus dan dimanfaatkan oleh pihak internal dan eksternal untuk mengontrol efisiensi dan efektivitas pengeluaran yang dilaksanakan. Penggunaan satuan ukur bagi pihak intern adalah rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan serta efisiensi biaya. Sementara pihak ekstern menggunakan sebagai kontrol dan sekaligus sebagai informasi untuk pertanggungjawaban kepada publik/rakyat.

### **3.1.4 Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan keuangan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun tertentu dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja. Sedangkan yang dimaksud Laporan Realisasi Anggaran Belanja adalah laporan realisasi anggaran yang menyajikan informasi realisasi unsur-unsur belanja yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode yang terdiri dari apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (dokumen dari aprosiasasi guna membiayai pengeluaran selama periode otorisasi).

Laporan realisasi anggaran belanja disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur belanja yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan realisasi anggaran belanja menyandingkan realisasi belanja dengan anggarannya, yang lebih lanjut dijelaskan dalam Catatan Atas laporan Keuangan (CALK) yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter,

sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu dijelaskan.

### **3.1.5 Manfaat Realisasi anggaran**

Manfaat informasi Realisasi Laporan Anggaran mencakup hal berikut:

- a. Laporan Realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Menyediakan informasi mengenai sumber alokasi dana dan penggunaan sumber daya ekonomis serta menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
- b. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan informasi kepada pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomis.

### **3.1.6 Manfaat Penyusunan Anggaran**

Manfaat penyusunan anggaran hendaknya menggambarkan hal-hal berikut:

- a. Sebagai pedoman pengelolaan negara  
Anggaran menggambarkan rencana pedoman pelaksanaan di dalam penyelenggaraan negara dalam suatu periode tertentu. Adanya anggaran tersebut, pemerintah dapat mengukur kemampuan keuangan untuk membiayai pembangunan dengan melihat ekspektasi pendapatan dalam perusahaan tersebut. Anggaran merupakan langkah awal pemerintah menuju langkah konkrit berikutnya. Selanjutnya anggaran merupakan alat pengendalian dan pengawasan kegiatan pemerintah baik bagi

pemerintah sendiri ataupun pihak luar seperti DPR/MPR, BPK RI dan lainnya.

b. Anggaran sebagai alat prioritas

Jumlah pendapatan sangat terbatas sementara belanja selalu meningkat sering kali terjadi diberbagai negara, estimasi pendapatan dibuat secara konservatif, sedangkan di dalam penyusunan anggaran belanja suatu unit dibuat tinggi/meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu pemerintah harus membuat skala prioritas berdasarkan tingkat kepentingan belanja negara tersebut.

c. Sebagai alat negosiasi politik

Adanya sumber daya keuangan yang dikelola pemerintah merupakan sarana negosiasi politik dengan parlemen yang terdiri dari berbagai partai politik yang memiliki tujuan yang berbeda. Oleh karena itu, negosiasi anggaran di parlemen merupakan proses yang menarik untuk dikaji karena disitulah terlihat adanya berbagai kepentingan.

### **3.1.7 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran**

Penyusunan anggaran sangat dipengaruhi faktor-faktor berikut ini:

1. Faktor Intern

Yaitu data, informasi dan pengalaman yang terdapat di dalam perusahaan/entitas pemerintahan itu sendiri.

Faktor-faktor tersebut antara lain:

- a. Realisasi anggaran tahun-tahun lalu;
- b. Kebijakan perusahaan/pemerintah itu sendiri;
- c. Modal kerja yang dimiliki perusahaan/pemerintahan;
- d. Fasilitas yang dimiliki perusahaan/pemerintah.

2. Faktor Ekstern

Yaitu data, informasi dan pengalaman yang terdapat diluar perusahaan/instansi pemerintah tersebut tetapi berpengaruh terhadap perusahaan/instansi pemerintah. Faktor-faktor tersebut antara lain:

- a. Keadaan pesaing;

- b. Tingkat pertumbuhan penduduk;
- c. Tingkat penghasilan masyarakat;
- d. Tingkat pendidikan masyarakat;
- e. Berbagai kebijakan pemerintah pusat;
- f. Keadaan perekonomian nasional dan internasional;
- g. Keadaan politik nasional dan internasional.

### **3.1.8 Pengertian Belanja Daerah**

Berdasarkan Permendagri no 13 tahun 2006 yang dimaksud dengan Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Untuk pelaksanaan pembangunan tersebut maka setiap pemerintah daerah memiliki anggaran belanja guna pelaksanaan program tersebut. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang harus dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk menentukan besarnya anggaran yang akan dikeluarkan dalam hal belanja daerah. Anggaran belanja daerah adalah suatu anggaran untuk membiayai aktifitas pemerintah sehari-hari yang disusun pemerintah untuk mengetahui besarnya belanja daerah yang dikeluarkan dalam suatu periode dan terdiri dari:

- a. Belanja aparatur daerah.
- b. Belanja pelayanan public
- c. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan
- d. Belanja tidak disangka

Masing-masing belanja yang meliputi belanja administrasi umum, belanja operasi, dan pemeliharaanserta belanja modal. Belanja tidak tersangka dianggarkan untuk pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan daerah, yaitu:

- a. Pengeluaran-pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana langsung dengan pelayanan masyarakat, yang

dianggarkannya tidak tersedia dalam Tahun anggaran yang bersangkutan.

- b. Pembagian atas kelebihan penerimaan yang terjadi dalam Tahun Anggaran yang telah ditutup dengan didukung bukti-bukti yang sah.

### **3.1.9 Kelompok Belanja Daerah**

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) No 3 Tahun 2006 untuk memudahkan penilaian kewajaran suatu program atau kegiatan, belanja daerah terdiri dari dua kelompok yaitu:

1. Kelompok Belanja Tidak Langsung

Kelompok belanja tidak langsung ini dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari dua kelompok, yaitu :

- a. Belanja Pegawai

Merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- b. Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

- c. Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan atau lembaga tertentu agar harga jual produksi dan jasa yang dihasilkan, dapat terjangkau oleh masyarakat luas.

- d. Belanja Hibah

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan jasa kepada pemerintah maupun pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat serta



perorangan yang secara spesifik telah memiliki peruntukan yang jelas.

e. **Bantuan Sosial**

Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan barang kepada masyarakat, dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

f. **Belanja Bagi Hasil**

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

g. **Bantuan Keuangan**

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan atau peningkatan kemampuan keuangan daerah.

h. **Belanja Tidak Terduga**

Belanja tidak terduga merupakan tindakan belanja untuk kegiatan yang bersifat tidak biasa atau tidak diharapkan akan terjadi seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya, yang telah ditutup.

2. **Kelompok Belanja Langsung**

Belanja Langsung ialah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah, belanja tidak langsung terdiri dari:

a. **Belanja Pegawai**

Belanja Pegawai langsung biasanya digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

b. Belanja barang dan jasa

Belanja barang dan jasa langsung digunakan untuk pengeluaran dalam bentuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

c. Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti tanah, bangunan, jalan, mesin, irigasi, dan aset tetap lainnya.

### **3.1.10 Kegunaan Belanja Daerah**

Belanja daerah memiliki banyak kegunaan diantaranya adalah:

1. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah.
2. Untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan namun juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara memungkinkan pengukuran belanja tersebut.
3. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Namun dalam kenyataanya pengelolaan belanja daerah tersebut sering terjadi permasalahan diantaranya:

- a. Masih rendahnya kemampuan keuangan daerah khususnya PAD sehingga masih sangat tergantung pada pemerintah pusat terutama dalam hal ketersediaan DAU dan DAK.
- b. Adanya ketidaksinkronisan berbagai peraturan pengelolaan keuangan daerah dan perubahan peraturan sering berubah.
- c. Pengelola keuangan daerah belum didukung oleh SDM yang memadai.

### **3.1.11 Analisis Kinerja Belanja**

Analisis kinerja belanja daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomi, efisien, dan efektif (*value for money*). Sejauh mana pemerintah daerah telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran. Kinerja anggaran belanja daerah dinilai baik apabila realisasi belanja lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan dan hal itu menunjukkan efisiensi belanja. Dalam hal belanja daerah penting juga dianalisis keserasian belanja karena hal itu terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi dan stabilitas.

Berdasarkan informasi dari laporan Realisasi Anggaran Belanja, dapat dianalisis kinerja belanja dengan beberapa analisis berikut ini :

#### **a. Analisis Varians Belanja**

Analisis varians belanja merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan, maka dapat diketahui secara langsung varians belanja antara anggaran belanja dan realisasinya yang dapat dinyatakan dalam bentuk nilai nominalnya atau persentasenya. Kinerja pemerintah daerah dapat dinilai baik jika realisasi belanja lebih kecil dari yang dianggarkan, jika sebaliknya maka mengindikasikan kinerja yang kurang baik.

b. Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun positif atau negatif. Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Alasan kenaikannya biasanya dikaitkan dengan penyesuaian inflasi, perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah cakupan layanan dan penyesuaian faktor makro ekonomi. Pertumbuhan biaya harus diikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang seimbang.

c. Analisis Varians Belanja

Analisis efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak absolut, tetapi relatif. Kita hanya dapat mengatakan bahwa tahun ini belanja pemerintah relatif lebih efisien jika dibandingkan dengan tahun lalu. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100% sebaliknya jika melebihi 100% maka mengindikasikan telah terjadi pemborosan anggaran.

d. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan dapat digunakan untuk mengetahui pola anggaran pemerintah daerah. Juga dapat digunakan untuk membaca kebijakan pemerintah daerah. Salah satu pos yang paling urgen analisis pembiayaan ini adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA). Makin besar SILPA yang diperoleh dari suatu anggaran dapat dijadikan salah satu indikator kurang tepatnya penyajian suatu rencana anggaran.

e. Analisis Keserasian Belanja

Analisis ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya secara optimal. Semakin tinggi prosentase dana yang dialokasikan untuk belanja yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana, maka porsi untuk ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Analisis keserasian belanja meliputi:

- 1) Rasio Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan terhadap total belanja
- 2) Rasio Belanja Operasi terhadap total belanja
- 3) Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja
- 4) Rasio Belanja Langsung dan Tidak Langsung terhadap total belanja.

Dengan melihat kinerja pendapatan, kinerja belanja dan kinerja pembiayaan maka dapat dilihat kinerja APBD secara umum. Jika semua kinerja tersebut menunjukkan pencapaian angka yang sudah ditargetkan. Maka dapat dikatakan bahwa kinerja APBD adalah baik.

### 3.1.12 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan untuk mengetahui kinerja belanja pemerintah daerah:

#### a. Analisis Varians Belanja

Varians belanja merupakan selisih antara realisasi belanja dengan belanja yang dianggarkan, Yaitu:

$$\text{Varians Belanja} = \text{Anggaran Belanja} - \text{Realisasi Belanja}$$

#### b. Analisis Pertumbuhan Belanja

Pertumbuhan belanja merupakan penambahan belanja yang dialokasikan pemerintah daerah dari tahun ke tahun, dirumuskan sebagai berikut:

Pertumbuhan belanja tahun t =

$$\frac{\text{Belanja Tahun } t - \text{Belanja Tahun } (t - 1)}{\text{Belanja Tahun } (t - 1)} \times 100\%$$

#### c. Analisis Efisiensi Belanja

Analisis Efisiensi diukur dengan rasio antar realisasi belanja dengan belanja yang dianggarkan, dengan rumus:

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

d. Analisis Pembiayaan

Analisis Pembiayaan merupakan perbandingan antara SILPA dari tahun ketahun, Semakin besar SILPA menunjukkan indikator kurang tepatnya penyajian suatu anggaran.

e. Analisis Keserasian Belanja

Untuk menganalisis keserasian belanja digunakan rasio-rasio :

- Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja

$$\frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

- Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja

$$\frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

f. Rekapitulasi Analisis Belanja

| No. | Analisis Belanja    | Ukuran                                   | Kriteria |
|-----|---------------------|--|----------|
| 1   | Varians Belanja     | Realisasi Belanja < Anggaran             | Baik     |
| 2   | Pertumbuhan Belanja | Positif                                  | Baik     |
| 3   | Efisiensi Belanja   | Rasio Efisiensi < 100%                   | Baik     |
| 4   | Pembiayaan          | Semakin kecil SILPA                      | Baik     |
| 5   | Keserasian Belanja  | Semakin besar % untuk ekonomi masyarakat | Baik     |

## 3.2 Tinjauan Praktik

### 3.2.1 Data Belanja Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah

Tabel 3.1

Data Anggaran Belanja Tahun 2014-2016 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah

| Anggaran                | Tahun                 |                       |                       |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                         | 2014                  | 2015                  | 2016                  |
| Belanja Daerah          | <b>23.361.377.000</b> | <b>26.203.544.000</b> | <b>24.071.581.000</b> |
| Belanja Tidak Langsung  | <b>9.829.840.000</b>  | <b>11.786.714.000</b> | <b>11.959.081.000</b> |
| Belanja Pegawai         | 9.829.840.000         | 11.786.714.000        | 11.959.081.000        |
| Belanja Langsung        | <b>13.531.537.000</b> | <b>14.416.830.000</b> | <b>12.112.500.000</b> |
| Belanja Pegawai         | 1.180.174.000         | 999.775.000           | 1.525.618.000         |
| Belanja Barang dan Jasa | 10.600.625.000        | 11.599.120.000        | 8.514.629.000         |
| Belanja Modal           | 1.750.738.000         | 1.817.935.000         | 2.072.253.000         |

Sumber: Data sekunder yang diolah

Tabel 3.2

Data Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2014-2016 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah

| Anggaran Belanja Daerah | Tahun                 |                       |                       |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                         | 2014                  | 2015                  | 2016                  |
| Belanja Daerah          | <b>21.500.279.044</b> | <b>24.738.330.177</b> | <b>23.390.958.552</b> |
| Belanja Tidak Langsung  | <b>9.051.851.018</b>  | <b>11.438.140.114</b> | <b>11.503.144.812</b> |
| Belanja Pegawai         | 9.051.851.018         | 11.438.140.114        | 11.503.144.812        |
| Belanja Langsung        | <b>12.448.428.026</b> | <b>13.300.190.063</b> | <b>11.887.813.740</b> |
| Belanja Pegawai         | 1.132.250.260         | 939.621.800           | 1.501.116.359         |
| Belanja Barang dan Jasa | 9.761.202.766         | 10.657.061.223        | 8.358.106.088         |
| Belanja Modal           | 1.554.975.000         | 1.703.507.040         | 2.028.591.293         |
|                         |                       |                       |                       |

Sumber: Data sekunder yang diolah

### 3.2.2 Perbandingan antara anggaran dengan realisasi Belanja Daerah

Dalam penyusunan anggaran dan realisasi tentunya akan terdapat selisih atau perbedaan. Adanya perbandingan ini dapat digunakan sebagai penilaian kinerja untuk pemerintah. Dimana perbandingan ini dinilai berdasarkan selisih antara realisasi dan anggaran. Selisih keduanya akan menguntungkan jika jumlah yang dianggarkan lebih besar dari jumlah realisasi belanja yang dikeluarkan. Namun jika jumlah realisasi lebih besar dari yang dianggarkan maka akan terjadi defisit. Dibawah ini Penulis akan membandingkan menurut pos – pos belanja yang ada.



### 3.2.2.1 Perbandingan antara anggaran dengan realisasi untuk Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran dan saldo tersebut dimulai pada 1 januari sampai 31 desember selama 3 tahun. Belanja Daerah tersebut terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung, Antara realisasi dan anggaran tidak sama maka akan terdapat selisih dan Karena adanya besarnya selisih tersebut akan menjadi penilaian kinerja pemerintah serta sebagai laporan pertanggungjawaban.

Tabel 3.3  
Selisih Anggaran Dengan Realisasi untuk Belanja Daerah  
Tahun 2014 – 2016

| Tahun | Anggaran       | Realisasi      | Selisih       |
|-------|----------------|----------------|---------------|
| 2014  | 23.361.377.000 | 21.500.279.044 | 1.861.097.956 |
| 2015  | 26.203.544.000 | 24.738.330.177 | 1.465.213.823 |
| 2016  | 24.071.581.000 | 23.390.958.552 | 680.622.448   |

Sumber: data sekunder yang diolah

### 3.2.2.2 Perbandingan antara anggaran dengan realisasi untuk belanja tidak langsung

Belanja tidak langsung ialah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pada suatu periode anggaran dan saldo tersebut dimulai pada 1 januari sampai 31 desember selama 3 tahun. Belanja tidak langsung tersebut terdiri dari, belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan lain sebagainya . Antara realisasi dan anggaran tidak sama maka akan terdapat selisih dan karena adanya besar selisih tersebut.

Tabel 3.4  
Selisih Anggaran Dengan Realisasi untuk Belanja Tidak Langsung  
Tahun 2014 – 2016

| Tahun | Anggaran       | Realisasi      | Selisih     |
|-------|----------------|----------------|-------------|
| 2014  | 9.829.840.000  | 9.051.851.018  | 777.988.982 |
| 2015  | 11.786.714.000 | 11.438.140.114 | 259.426.114 |
| 2016  | 11.959.081.000 | 11.503.144.812 | 455.936.188 |

Sumber: data sekunder yang diolah

### 3.2.2.3 Perbandingan antara anggaran dengan realisasi untuk belanja pegawai tidak langsung

Belanja pegawai tidak langsung merupakan belanja kompensasi yang diberikan dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada suatu periode anggaran dan saldo tersebut dimulai dari 1 januari sampai 31 desember selama 3 tahun. Belanja pegawai tidak langsung tersebut terdiri dari, gaji pokok dan tunjangan pegawai. Antara realisasi dan anggaran tidak sama maka akan terdapat selisih dan karena adanya besar selisih tersebut akan menjadi penilaian kinerja pemerintah serta sebagai laporan pertanggungjawaban.

Tabel 3.5  
Selisih Anggaran Dengan Realisasi untuk Belanja Pegawai Tidak  
Langsung Tahun 2014 – 2016

| Tahun | Anggaran       | Realisasi      | Selisih     |
|-------|----------------|----------------|-------------|
| 2014  | 9.829.840.000  | 9.051.851.018  | 777.988.982 |
| 2015  | 11.786.714.000 | 11.438.140.114 | 259.426.114 |
| 2016  | 11.959.081.000 | 11.503.144.812 | 455.936.188 |

Sumber: data sekunder yang diolah

#### 3.2.2.4 Perbandingan antara anggaran dengan realisasi untuk belanja langsung

Belanja langsung ialah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah pada suatu periode anggaran dan saldo tersebut dimulai pada 1 Januari sampai 31 Desember selama 3 tahun. Belanja langsung tersebut terdiri dari, belanja pegawai langsung, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Antara realisasi dan anggaran tidak sama maka akan terdapat selisih dan karena adanya besar selisih tersebut akan menjadi penilaian kinerja pemerintah serta sebagai laporan pertanggungjawaban.

Tabel 3.6

Selisih Anggaran Dengan Realisasi untuk Belanja Langsung Tahun  
2014 – 2016

| Tahun | Anggaran       | Realisasi      | Selisih       |
|-------|----------------|----------------|---------------|
| 2014  | 13.531.537.000 | 12.448.428.026 | 1.083.108.974 |
| 2015  | 14.416.830.000 | 13.300.190.063 | 1.116.639.937 |
| 2016  | 12.112.500.000 | 11.887.813.740 | 224.686.260   |

Sumber: data sekunder yang diolah

#### 3.2.2.5 Perbandingan antara anggaran dengan realisasi untuk belanja pegawai langsung

Belanja pegawai langsung digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah pada suatu periode anggaran dan saldo tersebut dimulai pada 1 Januari sampai 31 Desember selama 3 tahun. Antara realisasi dan anggaran tidak sama maka akan terdapat selisih dan karena adanya besar selisih tersebut akan menjadi penilaian kinerja pemerintah serta sebagai laporan pertanggungjawaban.

Tabel 3.7  
Selisih Anggaran Dengan Realisasi untuk Belanja Pegawai Langsung  
Tahun 2014 – 2016

| Tahun | Anggaran      | Realisasi     | Selisih    |
|-------|---------------|---------------|------------|
| 2014  | 1.180.174.000 | 1.132.250.260 | 47.923.740 |
| 2015  | 999.775.000   | 939.621.800   | 60.153.200 |
| 2016  | 1.525.618.000 | 1.501.116.359 | 25.501.641 |

Sumber: data sekunder yang diolah

### 3.2.2.6 Perbandingan antara anggaran dengan realisasi untuk belanja barang dan jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran dalam bentuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah pada suatu periode anggaran dan saldo tersebut dimulai pada 1 januari sampai 31 desember selama 3 tahun. Belanja barang dan jasa tersebut terdiri dari belanja habis pakai, belanja cetak dan pengadaan, belanja sewa dan lain sebagainya. Antara realisasi dan anggaran tidak sama maka akan terdapat selisih dan karena adanya besar selisih tersebut akan menjadi penilaian kinerja pemerintah serta sebagai laporan pertanggungjawaban.

Tabel 3.8  
Selisih Anggaran Dengan Realisasi untuk Belanja Barang dan Jasa  
Tahun 2014 – 2016

| Tahun | Anggaran       | Realisasi      | Selisih     |
|-------|----------------|----------------|-------------|
| 2014  | 10.600.625.000 | 9.761.202.766  | 839.422.234 |
| 2015  | 11.599.120.000 | 10.657.061.223 | 942.058.777 |
| 2016  | 8.514.629.000  | 8.358.106.088  | 156.522.912 |

Sumber: data sekunder yang diolah

### 3.2.2.7 Perbandingan antara anggaran dengan realisasi untuk belanja modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah pada suatu periode anggaran dan saldo tersebut dimulai pada 1 januari sampai 31 desember selama 3 tahun. Belanja modal tersebut terdiri dari, belanja modal pengadaan peralatan dan mesin, pengadaan gedung dan bangunan serta pengadaan aset tetap lainnya. Antara realisasi dan anggaran tidak sama maka akan terdapat selisih dan karena adanya besar selisih tersebut akan menjadi penilaian kinerja pemerintah serta sebagai laporan pertanggungjawaban.

Tabel 3.9

#### Selisih Anggaran Dengan Realisasi untuk Belanja Modal Tahun 2014 – 2016

| Tahun | Anggaran      | Realisasi     | Selisih     |
|-------|---------------|---------------|-------------|
| 2014  | 1.750.738.000 | 1.554.975.000 | 195.763.000 |
| 2015  | 1.817.935.000 | 1.703.507.040 | 114.427.960 |
| 2016  | 2.072.253.000 | 2.028.591.293 | 43.661.707  |

Sumber: data sekunder yang diolah

### 3.2.3 Analisis Realisasi anggaran belanja daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah

Analisis diperlukan untuk mengetahui Kinerja yang merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan sesuatu kegiatan/program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan untuk membuat program perbaikan kedepannya.

#### 3.2.3.1 Analisis Varian Belanja

Analisis Varian Belanja digunakan untuk mengukur perbedaan antara belanja yang dianggarkan dan realisasi belanja yang telah dimanfaatkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah. Analisis Varian Belanja diukur dengan melihat selisih antara pemanfaatan belanja secara realisasi dengan belanja yang dianggarkan. Semakin kecil selisih antara anggaran dan realisasi belanja maka pemerintah pada umumnya telah memanfaatkan APBD khususnya Belanja Daerah dengan baik. Berdasarkan data yang berkaitan dengan Anggaran Belanja dan Realisasinya tersebut, maka dapat dihitung Varian Belanja selama 3 tahun berikut ini:

Tabel 3.10

Varian Belanja Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah  
Tahun 2014-2016

| Belanja Daerah    | Tahun Anggaran |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|
|                   | 2014           | 2015           | 2016           |
| Anggaran Belanja  | 23.361.377.000 | 26.203.544.000 | 24.071.581.000 |
| Realisasi Belanja | 21.500.279.044 | 24.738.330.177 | 23.390.958.552 |
| Varian Belanja    | 1.861.097.956  | 1.465.213.823  | 680.622.448    |

Sumber: data sekunder yang diolah

Dari tabel 3.9 tersebut di atas dapat diketahui bahwa selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 Varian Belanja menunjukkan angka yang positif, dengan selisih / varian yang semakin menurun tiap tahunnya. Hal ini berarti bahwa DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah telah memanfaatkan anggaran belanja dengan baik dimana realisasi belanja yang telah dilakukan DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah lebih kecil dari anggaran yang telah direncanakan. Dengan demikian dapat dikatakan dilihat dari Analisis Varian Belanja DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah telah memanfaatkan APBD dengan baik.

### 3.2.3.2 Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis Pertumbuhan Belanja digunakan untuk mengetahui pertambahan belanja yang dialokasikan Pemerintah Daerah dari tahun ke tahun. Pertumbuhan belanja yang selalu positif dari tahun ke tahun menunjukkan kinerja Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan Belanja dalam APBD semakin baik. Pertumbuhan belanja pada DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2014 sampai dengan 2016 tertuang dalam tabel 3.10 berikut ini:

Tabel 3.11

Pertumbuhan Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah  
Tahun 2014-2016

| Belanja Daerah    | Tahun Anggaran |                |                 |
|-------------------|----------------|----------------|-----------------|
|                   | 2014           | 2015           | 2016            |
| Realisasi Belanja | 21.500.279.044 | 24.738.330.177 | 23.390.958.552  |
| Pertumbuhan       |                | 3.238.051.133  | (1.347.371.625) |
| Keterangan        |                | Positif 15,06% | Negatif 5,44%   |

Sumber : data sekunder yang diolah

Berdasarkan tabel 2 tersebut di atas menunjukkan bahwa selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 Pertumbuhan Belanja adalah positif, sedangkan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016

mengalami pertumbuhan negative. Meskipun kalau ditinjau dari prosentase mengalami naik turun dan penurunan pertumbuhan cukup besar pada tahun 2016. Secara umum DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah telah mengupayakan pemanfaatan Belanja dalam APBD yang diberikan.

### 3.2.3.3 Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja merupakan rasio yang menggambarkan perbandingan antara realisasi pengeluaran/belanja daerah dengan anggaran belanja daerah. Berkaitan dengan data-data tersebut sebagaimana telah disajikan pada tabel tersebut diatas, maka rasio efisiensi belanja DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah tahun 2014–2016 adalah sebagaimana tersaji pada tabel 3.11 berikut:

Tabel 3.12

Rasio Efisiensi Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah  
Tahun 2014-2016

| Belanja Daerah          | Tahun Anggaran |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                         | 2014           | 2015           | 2016           |
| Realisasi Belanja       | 21.500.279.044 | 24.738.330.177 | 23.390.958.552 |
| Anggaran                | 23.361.377.000 | 26.203.544.000 | 24.071.581.000 |
| Rasio Efisiensi Belanja | 92,03%         | 94,44%         | 97,17%         |

Sumber: data sekunder yang diolah

Tabel 3.11 diatas memperlihatkan bahwa selama kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah telah melakukan efisiensi belanja dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari rasio efisiensi belanja mulai tahun 2014 sampai tahun 2016 kurang dari 100 persen dimana semakin kecil rasio belanja maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya. APBD akan efisien jika rasionya kurang dari 100 dan sebaliknya.



### 3.2.3.4 Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan merupakan perbandingan antara sisa lebih perhitungan anggaran ( SILPA ) dari tahun ketahun, semakin besar SILPA menunjukkan indikator kurang tepatnya penyajian suatu anggaran. SILPA DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 3.12 berikut ini:

Tabel 3.13

Analisis Pembiayaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah  
Tahun 2014-2016

| Tahun | SILPA         | Naik/Turun |
|-------|---------------|------------|
| 2014  | 1.861.097.956 | -          |
| 2015  | 1.465.213.823 | Turun      |
| 2016  | 680.622.448   | Turun      |

Sumber : data sekunder yang diolah

Berdasarkan tabel 3.12 tersebut di atas menunjukkan bahwa SILPA DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015 dan 2016 terjadi penurunan. Penurunan SILPA ini menjadi indikasi bahwa DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah telah tepat dalam penyajian APBD.

### 3.2.3.5 Analisis Kecerassian Belanja

Analisis keserasian belanja digunakan untuk mengetahui bagaimana Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan Belanja Daerahnya. Keberpihakan Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam penyediaan infrastruktur, layanan publik dan lain-lain yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dapat diketahui sejauh mana Pemerintah Daerah membelanjakan APBD yang diperuntukan ke arah itu. Kecerassian belanja Pemerintah Daerah dapat ditunjukkan dari berapa besar prosentase yang digunakan untuk belanja langsung dibandingkan dengan keseluruhan belanja yang dilakukan dan berapa besar prosentase yang digunakan untuk belanja tidak langsung

dibandingkan dengan keseluruhan belanja yang dilakukan. Rasio-rasio tersebut dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 3.13 berikut ini:

Tabel 3.14  
Rasio Belanja Langsung dan Tidak Langsung Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah  
Tahun 2014-2016

| Belanja Daerah                                 | Tahun Anggaran |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|
|  | 2014           | 2015           | 2016           |
| Realisasi Belanja Langsung                     | 12.448.428.026 | 13.300.190.063 | 11.887.813.740 |
| Realisasi Total Belanja                        | 21.500.279.044 | 24.738.330.177 | 23.390.958.552 |
| Rasio Belanja Langsung dan Total Belanja       | <b>57,89%</b>  | <b>53,76%</b>  | <b>50,82%</b>  |
| Realisasi Belanja Tidak Langsung               | 9.051.851.018  | 11.438.140.114 | 11.503.144.812 |
| Realisasi Total Belanja                        | 21.500.279.044 | 24.738.330.177 | 23.390.958.552 |
| Rasio Belanja Tidak Langsung dan Total Belanja | <b>42,21%</b>  | <b>46,24%</b>  | <b>48,18%</b>  |

Sumber: Data sekunder yang diolah

Dari tabel 3.13 tersebut di atas dapat diketahui bahwa DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah dalam mengalokasikan belanjanya memiliki kecenderungan prosentase yang cukup besar belanja yang digunakan untuk belanja Langsung dimana selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 rata-rata belanja Langsung mencapai 54.15% dari keseluruhan belanja, sedangkan untuk belanja Tidak Langsung DPMPTSP Provinsi

Jawa Tengah hanya mengalokasikan belanja Tidak Langsung rata – rata selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 hanya 45,85%.

Tabel 3.15  
Rasio Belanja Pegawai dan Belanja Modal Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah  
Tahun 2014-2016

| Belanja Daerah                                | Tahun Anggaran |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|
|   | 2014           | 2015           | 2016           |
| Realisasi Pegawai                             | 10.184.101.278 | 12.377.761.914 | 13.004.261.171 |
| Realisasi Total<br>Belanja                    | 21.500.279.044 | 24.738.330.177 | 23.390.958.552 |
| Rasio Belanja<br>Pegawai dan Total<br>Belanja | <b>47,36%</b>  | <b>50,03%</b>  | <b>55,59%</b>  |
| Realisasi Belanja<br>Modal                    | 1.554.975.000  | 1.703.507.040  | 2.028.591.293  |
| Realisasi Total<br>Belanja                    | 21.500.279.044 | 24.738.330.177 | 23.390.958.552 |
| Rasio Belanja<br>Modal dan Total<br>Belanja   | <b>7,23%</b>   | <b>6,88%</b>   | <b>8,67%</b>   |

Sumber: Data sekunder yang diolah

Dari tabel 3.14 tersebut di atas menunjukkan bahwa prosentase belanja pegawai rata – rata mencapai 50,99%. Jumlah ini sangat jauh lebih besar dari prosentase yang digunakan untuk biaya modal yang hanya rata – rata 7,59% dari total belanja DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah. Belanja modal tersebut digunakan untuk: belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, irigasi dan jaringan, serta belanja aset tetap lainnya.

Berdasarkan analisis keserasian belanja tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah dalam rencana maupun realisasi belanja daerahnya lebih besar porsinya pada Pegawai/Operasi sedangkan untuk penopang pelayanan publik dan penopang ekonomi, seperti infrastruktur, irigasi dan aset lainnya yang termasuk belanja modal masih rendah.